

Menafsir "Massacre" di Indonesia Tahun 1965-an

"The Indonesian Killings of 1965-1966: Studi from Java and Bali" (Robert Cribb, ed., Monash: Central of Southeast Asian Studies Monash University, 1990)

"Mereka telah melakukan tindakan yang sangat tidak manusiawi, namun tetap dapat mempertahankan rasa kemanusiaannya" (Robert Cribb).

Pembantaian beberapa ratus ribu manusia Indonesia sebagai akibat dari percobaan kudeta pada tahun 1965 yang dikenal sebagai Gerakan 30 September, merupakan salah satu pembantaian terbesar pada abad ke-20. Tetapi agak mengherankan, karena hal ini sangat jarang dibicarakan dalam sejarah Indonesia. Memang benar, sebagaimana dinyatakan Robert Cribb (editor buku ini) dalam kata pendahuluan, bahwa *massacre* (pembunuhan secara massal terhadap manusia) selalu terdapat dalam laporan-laporan mengenai Indonesia, tetapi bagaimanapun laporan-laporan ini adalah suatu matarantai yang terlepas-lepas yang berusaha untuk menjelaskan dan membuat kesimpulan atas pembantaian yang telah terjadi.

Dalam kebanyakan catatan disebutkan, pembantaian ini merebak dengan cepat pada beberapa tempat kemudian berakhir begitu saja. Datang dan pergi demikian cepatnya, dan segera lenyap

begitu saja seperti ditelan badai tropis. Para sejarawan Indonesia, demikian Cribb, tampaknya telah menemui kesulitan untuk mengidentifikasi baik aspek-aspek masyarakat Indonesia yang menyiapkan kita pada kenyataan bahwa pembantaian akan terjadi maupun mengidentifikasi jejak-jejak yang mereka tinggalkan pada tatanan politik sekarang ini.

Tidak mengherankan kalau kita memiliki pengetahuan yang sangat terbatas mengenai pembantaian massal yang mengikuti usaha kudeta tahun 1965, walaupun garis besar dan kejadian tersebut sangat jelas. Pembantaian terjadi beberapa minggu setelah kudeta, meluas dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur, kemudian Bali, dan menyebar ke pulau-pulau lainnya dalam skala yang lebih kecil namun masif. Dalam buku ini dijelaskan, pada sebagian besar wilayah, pembantaian dilakukan oleh unit-unit tentara dan kelompok-kelompok siaga sipil (antara lain buku ini menyebut Pemuda Ansor).

Dalam beberapa kasus, tentara terlibat langsung dalam aksi pembantaian, tetapi seringkali hanya sebagai penyalur senjata, memberi sekadar pelatihan dan dorongan

yang kuat kepada kelompok-kelompok sipil yang menjadi sangat penting dalam aksi pembantaian ini. Pembantaian massal ini baru dapat dikatakan berakhir pada bulan Maret 1966. Tetapi di beberapa tempat sesekali muncul gejolak-gejolak yang terus berkelanjutan sampai tahun 1969. Informasi yang rinci mengenai siapa yang dibantai, di mana, kapan, mengapa, dan dilakukan oleh siapa tetap saja tidak jelas sehingga sebagian besar kesimpulan yang telah dibuat dianggap sebagai kesimpulan sementara.

Ada beberapa alasan mengapa informasi ini menjadi sangat kurang. *Pertama*, saat itu jumlah para jurnalis Barat dan akademisi Indonesia relatif kecil, dan mereka yang ada pun aksesnya terhadap sumber dan cerita seringkali tergantung pada militer. Transportasi juga sulit, sehingga sulit untuk melakukan perjalanan dan seringkali berbahaya, dan kesempatan untuk mengumpulkan catatan mengenai pembantaian dari sumber terdekat juga sangat terbatas.

Pada tahun-tahun berikutnya memang transportasi dan perjalanan tidak menjadi masalah lagi di Indonesia. Namun demikian, dengan masih berkuasanya rezim yang mengatur dan menyetujui pembantaian, mereka yang mengetahui kejadian itu dapat dimengerti kalau kemudian memilih bungkam ketika ditanya tentang kejadian pada tahun 1965-1966, agar mereka juga tidak menjadi korban. Bahkan apabila ada yang mencoba untuk membicarakannya dengan para pelajar Indonesia di luar

negeri, dapat dipahami juga kalau mereka sangat berhati-hati mengenai informasi yang akan dipublikasikan yang mungkin akan membahayakan informan mereka.

Kedua, pers lokal di Indonesia saat itu juga dihambat, bukan hanya akses terhadap cerita-cerita di kota-kota di luar kota besar (Jakarta) yang sangat dibatasi, tetapi juga karena kualitas jurnalisme investigasi Indonesia telah lama rusak di bawah rezim Demokrasi Terpimpin Soekarno. Sebanyak 21 koran telah dibredel oleh pemerintah awal tahun 1965, karena mendukung terbentuknya front antikomunis yang dikenal dengan Barisan Pendukung Soekarnoisme.

Pada bulan-bulan terakhir Demokrasi Terpimpin, penerbitan pers Indonesia menekankan pada pembenaran terhadap ideologi (bahkan sering masalah politik) daripada sebagai investigasi jurnalistik. Ketika pers Nasional ramai oleh berita investigasi jurnalistik tentang pembantaian di Purwodadi (Jawa Tengah) — hasilnya disertakan dalam buku ini dalam bab 9— kita dapat melihat bahwa investigasi jurnalistik telah bekerja. Namun sayangnya otoritas terhadap sensitivitas pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan dalam kasus ini mengindikasikan adanya kesulitan besar untuk mengadakan penyelidikan ada pembantaian sebelumnya, yang lebih besar. Apalagi ketika wartawan melakukan wawancara seringkali dikawal oleh tentara sehingga narasumber menjadi enggan berbicara apa adanya karena rasa takut menghinngapi.

Bahkan setelah bagian terburuk dari pembantaian massal berlalu dan jejak-jejak yang akan menuntun kepada para pelaku pembantaian telah tertutup, bangsa Indonesia masih tetap enggan untuk mencatat detail-detail pembantaian ini. Seperti yang dikemukakan Michael van-Langenberg, rasa malu karena membiarkan terjadinya pertumpahan darah mungkin telah menjadi penyebab keengganan tersebut, walaupun sebagian orang Indonesia sudah merasa puas, bahkan ada yang merasa bangga dengan dihapuskan Partai Komunis Indonesia (PKI), ada juga yang berpikir bahwa cara pemberantasan PKI patut dipuji.

Menurut Cribb, di samping laporan-laporan resmi negara, ada tiga catatan substantif tentang *massacre* yang terjadi di Indonesia yang mencatat tentang tragedi itu dalam bentuk catatan tertulis. *Pertama*, yang dirumuskan dalam buku ini sebagai "data tambahan pada kekejaman kontra-revolusi di Indonesia, khususnya di Jawa Timur", mungkin dituliskan pada sekitar tahun 1970-an dan merupakan sebuah daftar insiden yang disusun berdasarkan laporan-laporan lainnya.

Kedua, catatan pribadi yang singkat tapi sangat menarik, ditulis pada tahun 1989 oleh organisasi pemuda sayap kiri, mungkin oleh Pemuda Rakyat (berafiliasi dengan PKI) yang lolos dari kematian, tetapi telah menyaksikan banyak pembantaian dari persembunyian. Catatannya dirumuskan dalam sebuah tulisan berjudul *By the Banks of The Brantas*, yang saat ini telah dipublikasikan di Barat. Tetapi tidak

ada sebuah kasus pun yang dapat diketahui dengan jelas identitas sumbernya atau keadaan yang membawa kita kepada penulis asli dan catatan ini.

Ketiga, memoar yang sangat menarik dari Pipit Rochijat, yang berjudul *I am PKI or non-PKI?*. Tulisan ini sangat menarik karena memberi pertimbangan pada arti penting pembantaian bagi Indonesia saat ini. Sumber yang lebih kaya lagi mengenai pembantaian di Indonesia adalah kumpulan cerita pendek yang dimuat dalam sebuah majalah sastra Indonesia beberapa waktu setelah kejadian dalam tahun yang sama. Cerpen yang dikumpulkan dan diterjemahkan oleh Harry Aveling ini, memberikan gambaran yang tajam bagi kita mengenai apa arti pembantaian bagi Indonesia dan bentuk sastra yang terkandung dalam tulisan-tulisan ini tidak lebih dari sekadar mencerminkan sebagian kejadian tersebut.

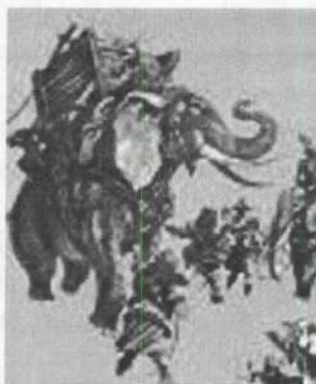
Terlepas dari alasan politis, kurangnya pengetahuan kita tentang pembantaian ini adalah sebagai konsekuensi dari kejadian yang tidak paralel dengan apa yang terjadi di Eropa dengan Nazi, dan Kamboja dengan Khmer Merah, di mana kedua kejadian tersebut sebenarnya mempunyai data yang cukup akurat sebagai bahan perbandingan. Ketidaktegasan mengenai identitas pembunuh merupakan hambatan untuk menganalisis apa sebenarnya tujuan dari setiap pembantaian, dan ketidakjelasan informasi ini menghalangi setiap upaya untuk membuat deskripsi jurnalistik atas pembantaian tersebut.

Ketidakpastian ini juga mencakup jumlah korban terbunuh. Pembantaian yang terjadi pada tahun 1965-1966 bersifat insidental, biasanya dilakukan pada malam hari oleh sekelompok orang. Kejadiannya begitu cepat dan sepertinya tidak memberikan kemungkinan bagi siapapun untuk mengetahui lebih jauh, setelah peristiwa terjadi orang hanya dapat mengetahui jumlah korban yang mati. Oleh karena itu perkiraan mengenai jumlah korban tewas harus digabungkan dan dicocokkan dengan laporan-laporan lainnya.

Jumlah angka resmi yang pertama dikeluarkan adalah 78.500 orang, data ini dikeluarkan oleh komisi pencari fakta —Fact Finding Commission— di bawah pimpinan Mayjend Soemarno, yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno pada akhir Desember 1965. Angka ini dianggap terlalu rendah, bahkan oleh anggota komisi itu sendiri. Satu-satunya perkiraan jumlah korban yang didasarkan pada usaha keras untuk mendapatkan bukti, adalah perkiraan yang dipimpin oleh Kopkamtib dibantu oleh sekitar 150 sarjana yang dilakukan pada tahun 1966. Laporan ini hanya diberikan untuk golongan terbatas, yaitu beberapa jurnalis dan akademisi barat. Laporan sepanjang 25 halaman ini memuat keterangan 800.000 jiwa terbunuh di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan masing-masing 100.000 di Bali dan

Sumatra. Skala investigasi dari laporan tersebut menunjukkan bahwa laporan ini memang layak dipercaya, tapi kesimpulan yang dibuat, dengan alasan tertentu, sulit untuk diterima.

Adalah suatu hal yang ganjil apabila *massacre* di Indonesia dikategorikan sebagai kematian massal yang "tidak disengaja". Umumnya kematian massal disebabkan oleh bencana kelaparan atau wabah penyakit, seperti terjadi di Ukraina pada tahun 1920, di Benggala pada 1943, di Cina pada masa pendudukan Jepang dan juga selama masa Great Leap Forward, termasuk juga pada masa pendudukan Indonesia di Timor-Timur. Dalam semua kasus ini telah



terjadi sebuah kelainan, kadang-kadang disengaja dilalaikan. Dalam situasi yang demikian, kebijakan pemerintah menyebabkan kematian dalam jumlah besar pada kondisi-kondisi yang membiarkan pemerintah yang menaruh perhatian mengklaim bahwa kematian massal itu bukanlah hal yang mereka kehendaki, tapi merupakan konsekuensi dari situasi yang tidak mampu mereka kontrol.

Pembantaian di Jerman dan pada masa Jerman menduduki Eropa, sudah jelas merupakan representasi dari tindakan negara, walaupun beberapa cendekiawan telah memperdebatkan apakah kejadian ini merupakan tanggungjawab dari pejabat tinggi negara Nazi atau bukan, negara sebagai suatu institusi jelas ikut

bersalah. Dalam kasus Indonesia di satu sisi pemerintah, paling tidak dalam beberapa kasus, hanya menjadi penonton terhadap pembantaian massal tersebut. Tindakan ini seperti mencoba menemukannya *massacre* ini sebagai peristiwa yang sama seperti peristiwa yang mengikuti pemisahan India pada tahun 1947 atau pengusiran terhadap orang-orang Yunani dari Asia Minor pada tahun 1922.

Di sini, bahkan, tidak terlihat adanya tanda-tanda bahwa para pembantai merasa memiliki beban moral atas pembantaian yang mereka lakukan. Walaupun mereka yang melakukan pembantaian biasanya berhadapan langsung dengan korban, seringkali mereka memenggal kepala korban dengan sebilah pedang besar, bukan dengan satuan regu tembak atau kamar gas seperti yang terjadi di tempat lain. Hal yang sangat menarik untuk dijadikan bahan tulisan para novelis adalah kemampuan penyesuaian mental para pelaku pembantaian tersebut. Mereka telah melakukan tindakan yang sangat tidak manusiawi, namun tetap dapat mempertahankan rasa kemanusiaannya.

Dalam buku ini kita hanya dapat mulai menggarisbawahi kemungkinan adanya hubungan antara faktor-faktor lokal dan skala nasional dari pembantaian tersebut. Adalah lebih baik memulai dengan hal tersebut, bahwa pada dasarnya terdapat efek-efek yang berlipat ganda antara faktor-faktor lokal dan nasional. Ken Young menunjukkan hal ini dalam kasus Kediri. Bagaimana percampuran

antara motif lokal dan nasional yang secara bersamaan saling berbenturan dalam keadaan yang tidak lazim, telah meluapkan antagonisme mendalam, yang terlampiaskan dalam bentuk pembantaian yang kejam. Kegagalan politik Nasional dalam menyediakan institusi yang dapat dikerjakan dan mengerjakan dengan baik kewajibannya untuk memenuhi janji kemerdekaan melemparkan kembali masyarakat Indonesia kepada loyalitas terhadap divisi-divisi sosial yang lama yang telah terpolarisasi di kalangan Islam dan Komunisme.

Antagonisme lama yang pernah mereda dengan adanya kebersamaan dalam loyalitas Nasional yang mendalam telah berubah menjadi kebencian yang hebat. Banyak catatan yang mengatakan, dendam lama tidak adanya hubungannya dengan ketegangan politik tahun 1965, tetapi dalam keadaan demikian ini pernyataan tersebut tidaklah benar: peristiwa yang telah menelan banyak korban pada tahun 1965-1966, semata-mata tidak hanya disebabkan oleh situasi politik, dan dendam telah berubah menjadi pola polarisasi sosial yang lebih luas.

Pertanyaannya, mengapa ketegangan ini kemudian mengarah kepada *massacre*, dan bukan pada perang sipil? Kesalahan apa yang telah dibuat PKI pada masa-masa krisis tersebut sehingga harus menanggung akibat seperti itu? Sebagian jawaban dari pertanyaan tersebut mungkin ada dalam lingkungan internasional. Pada masa itu, Perang Dingin mencapai puncaknya,

peperangan hebat meluas di Vietnam, Cina tampaknya mengarah untuk kembali ke paham kiri, dan perkembangan komunis yang meningkat pesat telah mengharuskan kelompok antikomunis untuk bekerja ekstra keras untuk menahan arus perkembangan tersebut.

Yang lebih penting, kesuksesan militer dalam memberikan label pendosa dalam norma sosial dan politik pada PKI. Indonesia telah mencapai kemerdekaannya di atas peraturan-peraturan dan undang-undang politik yang sangat minim. Praktek kontitusi dan konstitusional telah berkali-kali mengalami perubahan dan politik telah terkarakterisasi dengan eksperimentasi konstan yang menggunakan bentuk-bentuk baru. Demokrasi Terpimpin berusaha untuk mengakhiri ketidakstabilan ini dengan kembali ke UUD Indonesia 1945, dan dengan memaksakan ideologi ortodoks yang ditetapkan oleh Soekarno. Namun ternyata manuver-manuver politik terus berlanjut, dan satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah menutup-nutupi tindakan-tindakan politik dengan termonologi ideologi saat itu. PKI, militer, dan para pelaku politik lainnya di Indonesia semuanya menjalankan perannya dengan kompeten dalam kerangka yang berbau ritualistik.

Bagi masyarakat Indonesia, kurangnya kaidah perilaku berpolitik dan kebiasaan mengumbar basa-basi pada ideologi Demokrasi Terpimpin telah menimbulkan kesulitan untuk melakukan penilaian politis pada saat ambruknya perekonomian dan menjajarnya perti-

kai politik, menyebabkan penilaian-penilaian seperti itu bersifat imperatif. Usaha Indonesia untuk menghapus garis batas politis yang merupakan acuan di masa yang akan datang atau acuan bagi agenda politis para lawan politik utamanya telah sia-sia. Oleh karena itu, publik Indonesia pada saat itu siap menghadapi situasi yang akan membuka kedok para pelaku politik yang sesungguhnya. Apalagi *massacre* juga memberikan pengalaman-pengalaman masyarakat dan kenangan sejarah Nasional yang telah memungkinkan dan melegitimasi tumbuhnya kekuasaan negara selanjutnya (lihat bab 2).

Isi Buku

Bab pertama, berisi pendahuluan yang disusun oleh Robert Cribb yang mengutarakan dimensi-dimensi "tanda tanya" tentang *massacre* ini dengan mengulas faktor-faktor yang ditulis para penulis. Dikatakan Cribb, bahwa satu faktor *massacre* tidak bisa menjelaskan motif, faktor, dan situasi saat itu untuk menjelaskan secara nasional. Bab kedua, ditulis Michael van-Langenberg, yang menganalisis kejadian *massacre* dalam bingkai kekuasaan konteks Indonesia. Dalam bab ini, van-Langenberg terlihat secara teoritis mengungkap secara ilmiah bagaimana kejadian itu "spontan" bisa terjadi.

Bab ketiga, Kenneth R Young menulis pengaruh-pengaruh lokal dan nasional dalam aksi kekerasan tahun 1965-an. Pusat sebagai sopir dan di daerah juga ada "sopir-sopir" tak terdeteksi juga ikut

bermain. Ada kesulitan-kesulitan yang muncul kemudian menangkap pentingnya variabel-variabel yang khas daerah untuk menganalisis politik dan aksi kekerasan. Apalagi, kadang-kadang, pembantaian-pembantaian itu mengambang tidak jelas antara kebiadaban yang teratur dan *massacre* yang kacau tidak jelas.

Bab keempat, Keith Foulcher menulis asumsi kesastraan menciptakan sejarah Indonesia kontemporer berkaitan dengan peristiwa-peristiwa 1965-an. Mestinya tragedi itu memberi inspirasi bagi sastrawan untuk mengungkapkan secara apik dalam bingkai nilai dan makna kemanusiaan, kekerasan, dan sebagainya. Namun nyatanya, hampir sepanjang tahun 1970-an, sastra kreatif di Indonesia nyaris sama sekali tidak menyuarakan makna-makna peristiwa-peristiwa tahun 1965 dan akibatnya bagi kehidupan perorangan, masyarakat dan bangsa.

Bab kelima, Pusat Penelitian dan Studi Pedesaan dan Kawasan UGM Yogyakarta menulis hasil investigasi kasus pembantaian di desa-desa di Klaten dan Banyuwangi. Terlihat di situ bagaimana konflik antardesa ikut mempengaruhi dengan isu sentral komunisme dan antikomunisme. Faktor afiliasi politik anggota masyarakat ikut memicu juga, meski ada juga kasus perebutan tanah dengan memanfaatkan situasi genting.

Bab keenam, Dinas Sejarah TNI

Angkatan Darat memaparkan penumpasan G30S/PKI di Jawa Tengah. Operasi penumpasan itu dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan elemen masyarakat antikomunis yang disusun untuk menghadapi dan memulihkan situasi.

Salah satu hasilnya adalah menangkap DN Aidit yang kemudian diproses secara verbal dan Aidit mengakui bahwa ia satu-satunya yang harus memikul tanggungjawab atas kegagalan G30S.

Bab ketujuh, memaparkan data-data tambahan tentang kekejaman kontrarevolusioner di Indonesia khususnya di Jawa Timur yang ditulis oleh anonim (tidak dikenal).

Catatan-catatan kecil itu berupa paparan tentang detail-detail pembantaian di Lawang, Singosari, Tumpang (Malang); Kabupaten Jember; Nglegok, Garum (Blitar); Gurah, Pare, Keras (Kediri), dan Kabupaten Banyuwangi.

Bab kedelapan, Kenneth Orr menulis tentang pendidikan dan politik desa di Jawa tengah pada masa pergolakan itu yang diwarnai oleh kebingungan masyarakat bagaimana pendidikan harus dijalankan. Oleh karena situasi kacau, maka jam belajar anak didik banyak terbengkelai dan harus memperpanjang waktu sekolah hingga setengah tahun. Bab ini hendak menggambarkan bahwa generasi yang seharusnya tak ikut menanggung beban orang tua akibat konflik, tak pelak harus menerima kenyataan pahit.



Bab kesembilan ditulis oleh Maskun Iskandar dan Jopie Lasut yang memaparkan peristiwa pembantaian berdasar investigasi jurnalistik di Purwodadi. Laporan ini semula pernah dimuat di media cetak nasional. Dalam artikel ini dikemukakan bagaimana sulitnya melacak jejak-jejak pembantaian di Purwodadi. Meski di masyarakat beredar kencang bahwa memang ada pembantaian itu, namun pers sulit melacaknya.

Bab kesepuluh ditulis oleh Anton Lucas berisi pengakuan keprihatinan para korban yang lolos dari kematian berdasarkan wawancara. Mereka yang selamat dari upaya *massacre* itu tidak pernah "dibebaskan" sepenuh hati oleh masyarakat. Sehingga kehidupan mereka sesudah peristiwa itu hanya hidup untuk bertahan. Sebab kenyataan kehidupan setelah selamat dari maut itu sangat sulit, baik di dalam dan di luar penjara.

Bab kesebelas mengungkap pembantaian di wilayah Bali. Ditulis oleh Robert Cribb, Soe Hok Gie, dkk. Berusaha menggambarkan bahwa pembantaian itu bukan semata di Jawa dan Sumatera, akan tetapi juga menyentuh Bali secara sporadis. Anehnya, mereka yang membantai bukan penduduk setempat, akan tetapi sekelompok orang yang diseberangkan melalui selat Bali dengan bantuan kekuatan tertentu. Kekerasan di Bali ini, menurut Soe Hok Gie, dapat dikatakan jauh dari persoalan politik. Sebab masyarakat Bali tidak memiliki kepentingan politik. Saat itu Bali sudah menjadi surga bagi orang

Barat yang harus dipertahankan oleh masyarakat Bali sendiri.

Penutup

Kiranya buku ini tidak bermaksud hendak menyudutkan kelompok-kelompok tertentu yang terlibat dalam *massacre*. Namun buku ini lebih dititikberatkan pada tujuan untuk mulai memetakan kembali arti penting pembantaian yang pernah terjadi di Indonesia itu dalam sejarah Indonesia. Dengan menyatukan kembali apa yang sudah diketahui mengenai kejadian tersebut, tentu banyak makna penting yang dapat kita ambil. Apalagi tulisan-tulisan dalam buku ini, sekali lagi, bukan pernyataan final, masih bersifat kesimpulan sementara, bahkan boleh ditafsirkan kembali.

Oleh karena itu, tepat kiranya jika buku ini kita maknai sebagai analisis-analisis awal tentang *massacre* yang juga berisi sekumpulan masalah yang sangat rumit dalam sejarah Indonesia kontemporer, yakni masalah informasi, filosofi, dan interpretasi. Namun dengan menengahkan persoalan-persoalan ini, paling tidak kita telah membuat suatu langkah ke depan untuk menyelesaikan masalah ini. *Wallahu a'lam bish-shawab.* ❖

Kholilul Rohman Ahmad,

Staf Peneliti pada Lembaga Kajian Buku Indonesia, alumnus Pesantren Hidayatul Mubtadiin Ngunut Tulungagung, Jawa Timur. Saat ini aktif sebagai Presidium Jaringan Muda Nahdlatul Ulama (J@rMuNU), tinggal di Magelang Jawa Tengah.